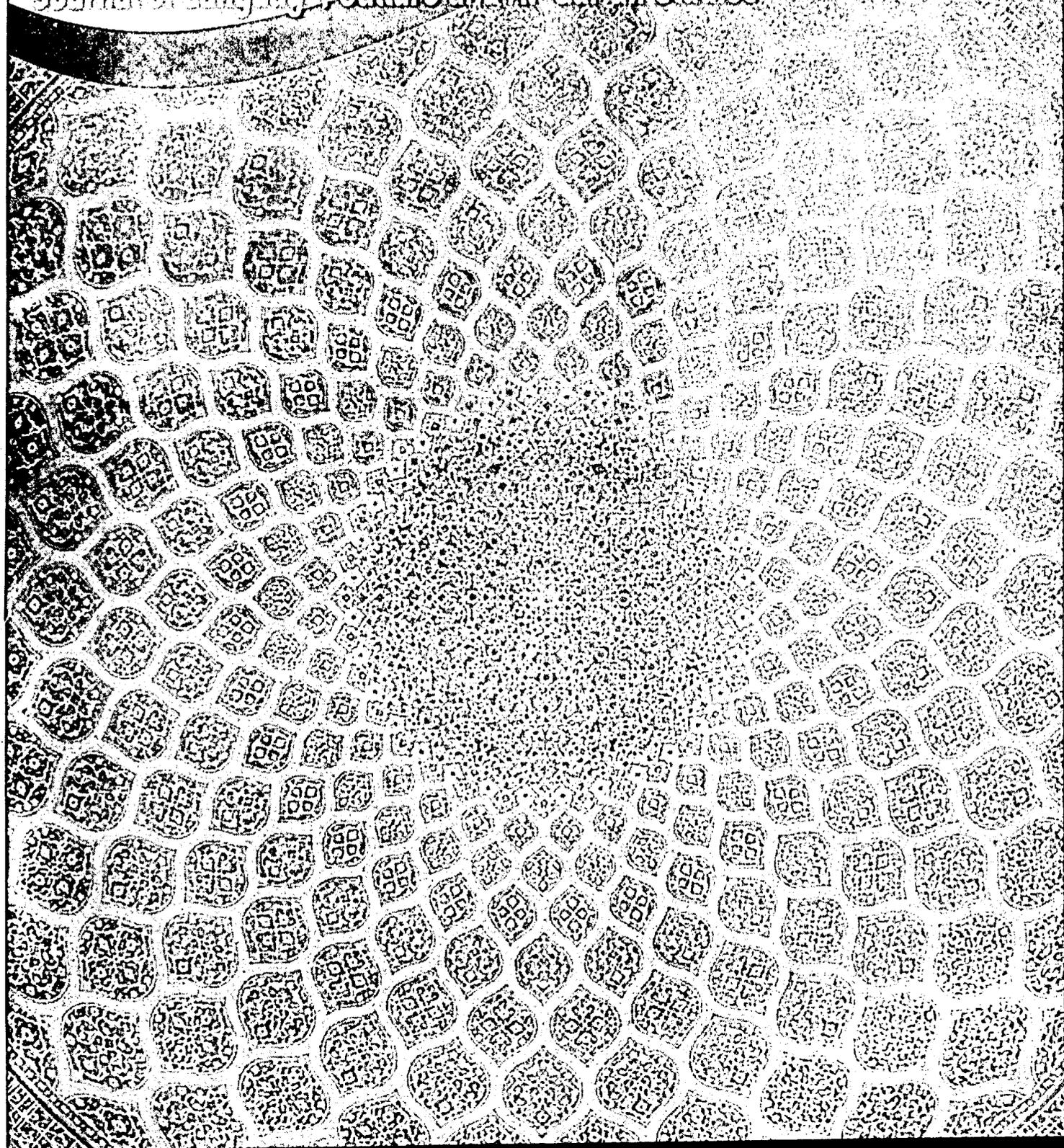


VOLUME II, Nomor 1 Juni 2012

ISSN 2302-3155

Condova

Journal of Language, Culture and Al-Qur'an Studies



ISSN 2302-3155

CORDOVA

Jurnal Bahasa, budaya dan Al-Qur'an IAIN Mataram
Volume II Nomor 1 Juni 2012

Pelindung

Rektor IAIN Mataram
Pembantu Rektor I IAIN Mataram

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Bahasa & Budaya IAIN Mataram

Ketua Dewan Redaksi

L. Maksum Ahmad, M.Pd.I

Sekretaris Redaksi

Imron Hadi, S.HI

Tim Ahli

Wahid Sambinae, M.Pd.
Drs. H. Ahmad Busyairi, MA
Drs. H. Zaidi Abdad, MA
Salman Al-Farisi
Fairuz Abu Macel

Dewan Redaksi

H. Subki, M.Pd.I
M. Zulfiani Hamdi, M.Pd
H. Salimul Jihad, MA
Ribhan, M.Pd
Hery Rahmat, M.Pd

Editor

Prosmala Hadisaputra, S.Sos.I

Layouter

Imron Hadi

Alamat Redaksi

PBB IAIN Mataram
Kampus Satu Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Nusa Tenggara Barat
Tlp./Fax : 0370-625337
Email : cordova_pbb@yahoo.com
Email : mikcum90@yahoo.com

keBersamaan dalam keBeRagaman keBerAgamaan

"Syahdan dua orang sahabat karib, yakni yang satu seorang pendeta, satunya lagi ustadz. Karena saking asyiknya bekerjasama dalam urusan kebaikan dunia, mereka tidak sempat memahami ritual agama masing-masing. Pada suatu hari keduanya naik pesawat. Ketika di dalam pesawat di atas langit ada petir menyambar, pak pendeta kaget dan berucap : "haleluyah". Pak ustadz di sebelahnya dengan lugunya "membetulan" ucapan pak pendeta. Bukan, itu halilintar, bukan haleluyah. Pak pendeta senyum menanggapi sahabatnya. Ketika pesawat turun, keduanya dijemput bus bandara. Sebelum kaki melangkah naik bus, pak ustadz berujar : "bismillah". Pak pendeta dengan lugunya juga "membetulan" ucapan sahabatnya. Bukan pak ustadz, ini bukan bismillah, namun Bis DAMRI. Pak ustadz juga tersenyum. Keduanya tidak sadar dengan kesalahpahaman memahami ritual agama masing-masing, dan mereka tetap bersahabat"

Anekdote di atas tentulah hanya gambaran bagi "Mesranya hubungan kemanusiaan" atas kesadaran persamaan "manusia ciptaan Tuhan" betapa perbedaan bukan "pabrik" kebencian dan permusuhan namun wadah hakiki bagi tumbuh berkembangnya "Kearifan Sejati" kebersamaan dalam keBeRagaman menuju hakikat keBerAgamaan. Bagi Islam "Bagiku agamaku dan bagimu agamamu", dan bagi pak pendeta, hidup adalah melayani sesama dengan cinta kasih. Singkatnya nggak ada masalah. Toleransi itu ialah ketika seekor kucing masuk kandang kambing tidak harus memaksakan diri mengembek dan sebaliknya. Pokoknya urusan agama adalah urusan pribadi dengan Tuhannya. Agama ibarat "isteri" yang tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya.

ketergantungan" (*the feeling of powerlessness*) yang membuat orang beragama sulit mencapai kedewasaan beragama karena gagal membangun otonomi dalam dirinya sebagai manusia. Perasaan tersebut berlainan dengan orang yang berhasil membangun "*religius feeling*" yang mampu mengembangkan ritual keberagaman menjadi konkret dan mencapai "peragian rohani" dengan mengembangkan dirinya menjadi khalifah di muka bumi. Keadilan, kebenaran, cinta kasih, persaudaraan, dst terus dikembangkan. Agama atau sistem kepercayaan pada dasarnya adalah pengalaman batin seseorang yang sifatnya subyektif karena penuh tafsiran (*inner state or subjective experience*). Permasalahannya daya dorong atau daya himbau ajaran agama yang sudah ditafsirkan tersebut selalu saja menumbuhkan fanatisme sehingga para pengikutnya akan berusaha "mati-matian" untuk mengobytifkannya di dunia nyata.

Karenanya Joachim Wach pernah bilang bahwa setiap kemunculan sistem kepercayaan baru, atau tafsir baru, pastilah akan diikuti oleh penciptaan dunia baru dimana konsep-konsep dan kelembagaan lama akan kehilangan makna dan alasan dasar kehadirannya. Dari titik inilah agama atau kepercayaan membangun basis perkauman dan memberikan struktur rohani, intelektual serta kebudayaan. Kesemuanya elemen ini akan mengintegrasikan setiap kelompok masyarakat yang saling berbeda dan memiliki pandangan dan sistem kepercayaan yang sama.

Pengelompokan dan daya himbau berdasarkan tafsir dan "klaim kebenaran" inilah yang sering menimbulkan krisis dan bentrokan antar pengikut agama atau kepercayaan. Fakta ini sudah lama diamati oleh Geertz yang mengatakan bahwa agama itu bukanlah kesimpulan dari realitas, namun mendahului realitas itu sendiri. Karenanya unsur determinasi mutlak dan tidak mau berdamai dengan realitas, merupakan karakter dasar dari agama.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka 67 tahun lebih di tahun 2012, kebhinekaan belum dapat ditransformasikan dalam kehidupan multikulturalisme. Kebhinekaan masih terlupakan dan sering dianggap penghalang dalam kehidupan sehari-hari. Multikulturalisme yang sudah ada sejak dahulu masih sebatas realitas sosial dan belum menjadi ideologi. Hubungan antar kelompok masih terjadi saling hegemoni. Ketika multikultural sudah menjadi ideologi. Pola hubungannya pun semestinya bukan invasi lagi melainkan sudah memasuki era konvergensi.

Ketika bertransformasi, masyarakat tidak hanya sekadar tinggal bersama (co-eksistensi), tetapi juga saling memberdayakan (pro-eksistensi)., Tampaknya gagasan untuk memahami teologi masing-masing agama dari perspektif inklusifisme dan pluralisme menjadi alternatif yang layak dikembangkan saat ini, karena hanya dengan paradigma inilah bangunan kerukunan hidup umat beragama dapat berdiri kokoh. Atas dasar ini, maka konsep apapun yang dirumuskan tidak dapat begitu saja diterima dan dilaksanakan tanpa disertai dengan pandangan yang sama tentang prinsip-prinsip inklusif dan pluralis.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari proposisi di atas adalah, bahwa teologi merupakan fondasi untuk membangun kerukunan. Sebaliknya, jika rumusan-rumusan teologi telah mampu mendorong semangat inklusifisme dan paham pluralisme, maka bangunan kerukunan hidup umat beragama telah berdiri di atas fondasi yang kokoh. Dengan demikian, kokoh atau rapuhnya bangunan kerukunan hidup umat beragama sangat tergantung pada tipe dan corak teologi dari masing-masing agama.

Perlu dipahami secara mendalam, kesatuan dalam keragaman bukanlah sebuah diktum teologi agama tertentu. Konsep ini telah bergulir lama dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama-agama di Indonesia. Makna yang didambakan dari konsep itu adalah kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan. Sekarang, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hampir telah menjadi teologi baru bagi bangsa Indonesia.

Masyarakat saat ini tengah berada dalam tingkat sensitivisme yang tinggi. Merebaknya kasus mafia hukum dan korupsi yang tak pernah tuntas, kesulitan hidup, kelangkaan kesempatan kerja, dan aneka kerusakan lingkungan lainnya menambah frustrasi masyarakat luas. Kegagalan negara dalam menegakkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan akan semakin membuat frustrasi masyarakat, dan rasa frustrasi akan berubah menjadi agresivitas jika mendapatkan pemicunya. Karenanya pencegahan kekerasan harus simultan antara perbaikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penegakkan hukum di segala bidang kehidupan. Jika satu diantaranya alpa, maka jangan harap kekerasan akan mudah dicegah. Bangsa ini sudah harus sadar bahwa penyempurnaan diri melalui transedensi terus menerus harus dilakukan, tidak dalam retorika atau sosialisasi palsu, namun benar-benar melepaskan diri dari kotak primordialisme. Bentuk-bentuk primordialisme seperti partai, aliran, atau golongan, hanya boleh berhenti pada level *metoda*, dan *bukan tujuan* hidup. Indonesia sudah harus lebih bergerak cepat menjadi manusia pasca-partai, pasca-golongan, pasca-etnik, dan berbagai formalisme agama yang jauh dari nilai-nilai spiritual etik. Semoga! Wallohu a'lam bissowab.

Ketua Dewan Redaksi

Maksum Ahmad

mikcum90@yahoo.com

Daftar Isi

Dari Redaksi

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi

Bahasa

**THE USE OF *THINK PAIR SHARE* STRATEGY IN IMPROVING STUDENT'S
SPEAKING ABILITY AT FIRST YEAR STUDENT OF MA NW ANJANI ACADEMIC YEAR 2011/2012**

Drs. Marzuki Adami, M.AP,

Amrullah, S.Pd., M.Pd ▶ 3 – 24

تدريس اللغة العربية : نظريتها وعناصرها

فتح الموجد : بقلم ▶ 25 – 44

طرق تعليم اللغة العربية

محمد إيمان الدين ▶ 45 – 76

CULTURE IMPLICATIONS OF LINGUISTIC SCIENCE

M. Mugni Assapari, M.Pd.B.I ▶ 77 – 84

CONTENT SELECTION IN CURRICULUM PLANNING

Heri Rahmat, M.Hum. ▶ 85 – 92

Budaya

**OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN LOKAL
DALAM PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DAERAH (LOMBOK)**

Imron Hadi, S.HI ▶ 95 – 102

NALAR POLITIK ARAB MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., MHI ▶ 103 – 110

**PHILOSOPHY OF SCIENCE IN ISLAM EDUCATION EFFORTS IN STRENGTHENING
EDUCATION FOUNDATION ISLAMIC PHILOSOPHY**

Fathurrahman Muhtar. ▶ 111 – 120

RELASI ANTAR KELOMPOK AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA

Syamsu Syauqani, Lc., MA ▶ 121 – 128

**MASALAH INGATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN BEBERAPA
STRATEGI MENINGKATKAN INGATAN SISWA**

Hj. Nurul Lailatul Khusniah, M.Pd ▶ 129 – 138

Al-Zur'an

KAJIAN LINGUISTIK AL-QURAN TENTANG IDENTITAS JENDER

Lalu Muhammad Iqbal Murad, MA ▶ 141 – 158

PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Subki, M.Pd.I ▶ 159 – 172

RELASI ANTAR KELOMPOK AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh: Syamsu Syauqani, Lc., MA

Abstract

Problems between the groups has been the concern of various parties in Indonesia. Government and certain institutions located in Indonesia has taken great care in responding to problems in the this archipelago, which is basically the area is enclosed by a multicultural environment. However, in view of the common people, the measures taken by the parties who should be responsible, the impression does not give results. It is judged from the facts and realities, especially those known from various mass media, that the problem of the conflict between these groups will never find common ground to declare peace.

Keywords: religious groups, people, Harmony.

Pendahuluan

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para tokoh agama berkumpul untuk menggugat kebohongan Pemerintah yang disampaikan Senin (10/1/2011) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Yang diantara menjadi poin dalam hal itu adalah berkenaan dengan kebebasan beragama. Pada saat presiden berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Pernyataan ini dianggap bohong, karena pada kenyataannya sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. "Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan, 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus".

Permasalahan agama merupakan salah satu masalah yang sangat sensitif, berhubungan dengan konflik antar kelompok. Karena dianggap sebagai suatu kepercayaan yang sakral dan suci, dan berlandaskan kepada keyakinan dan moralitas agama tersebut, banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi proses kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas oleh kelompok dominan, dengan mempermasalahkan penodaan suatu agama dan mengganggu ketertiban umum.

Disusunnya makalah ini didasarkan dengan beberapa alasan dan tujuan yang kemudian akan dipaparkan dalam uraian latar belakang dan permasalahan. Diharapkan dengan uraian berikut akan memberikan gambaran kepada pembaca tentang garis besar makalah ini, mengenai alasan dan tujuan yang diinginkan oleh penyusun.

Latar Belakang

Di Indonesia struktur masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, kelompok, dan agama—muncul praktek-praktek eksklusif sosial. Praktek eksklusif berdasar agama ini menyebabkan pengabaian, pengasingan dan pencabutan hak atas orang atau sekelompok orang disebabkan oleh pemahaman tentang agama. Praktek eksklusif ini sering menimpa kelompok minoritas yang memiliki aliran kepercayaan dan kelompok sekte keagamaan yang berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh negara. Pihak yang mempunyai daya untuk melakukan praktek

eksklusi sosial terhadap kaum minoritas ini adalah kaum dominan (kelompok agama yang berkuasa) demi memperoleh kekuatan dan perhatian dari penguasa. Pluralitas agama di Indonesia ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa namun di sisi lain juga menjadi ancaman yang berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat, bahkan disintegrasi nasional.⁶⁷

Hal inilah yang menjadi alasan kami untuk membahas bagaimana hubungan antar agama-agama yang ada di Indonesia. Merujuk pada pembahasan mata kuliah Sistem Sosial Indonesia, tentang Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia, penyusun mengangkat masalah hubungan antar agama ini dan melihatnya dari sudut pandang kerangka analisis sosiologis, yang menekankan kepada Teori Konflik.

Permasalahan

Di beberapa wilayah, integritas masyarakat masih tertata dengan kokoh. Kerjasama dan toleransi antar agama terjalin dengan baik, didasarkan kepada rasa solidaritas, persaudaraan, kemanusiaan, kekeluargaan dan kebangsaan. Namun hal ini hanya sebagian kecil saja karena pada kenyataannya masih banyak terjadi konflik yang disebabkan berbagai faktor yang kemudian menyebabkan disintegrasi dalam masyarakat.

Banyak konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia disebabkan oleh pertikaian karena agama. Contohnya tekanan terhadap kaum minoritas (kelompok agama tertentu yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah) memicu tindakan kekerasan yang bahkan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten baru-baru ini. Selain itu, tindakan kekerasan juga terjadi kepada perempuan, dengan menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang dianggap dapat merusak moral masyarakat. Kemudian juga terjadi kasus-kasus perusakan tempat ibadah atau demonstrasi menentang didirikannya sebuah rumah ibadah di beberapa tempat di Indonesia, yang mana tempat itu lebih didominasi oleh kelompok agama tertentu sehingga kelompok agama minoritas tidak mendapatkan hak.

Permasalahan konflik dan tindakan kekerasan ini kemudian mengarah kepada pertanyaan mengenai kebebasan memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UUD 1945, pasal 29 Ayat 2, sudah jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memeluk agama dan akan mendapat perlindungan dari negara.

Pada awal era Reformasi, lahir kebijakan nasional yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Namun secara perlahan politik hukum kebijakan keagamaan di negeri ini mulai bergeser kepada ketentuan yang secara langsung membatasi kebebasan beragama. Kondisi ini kemudian menyebabkan terulangnya kondisi yang mendorong menguatnya pemanfaatan kebijakan-kebijakan keagamaan pada masa lampau yang secara substansial bertentangan dengan pasal HAM dan konstitusi di Indonesia.⁶⁸

Hal inilah yang dilihat sebagai masalah dalam makalah ini, yaitu tentang konflik antar agama yang menyebabkan tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas dan mengenai kebebasan memeluk

⁶⁷ Lucia Ratih Kusmadewi, *Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), hlm.2

⁶⁸ Zainal Abidin Bagir, dkk, "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008", *Program Studi Agama dan Lintas Budaya*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), hlm.8

agama dan beribadah dalam konteks relasi sosial antar agama. Penyusun mencoba memberikan analisa untuk menjawab masalah ini dilihat dari sudut pandang kerangka analisis sosiologis: teori konflik.

Di sini timbul dua pertanyaan, yaitu :

- 1) Mengapa konflik agama bisa terjadi, padahal ketentuan dan peraturan tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sudah diatur di dalam UUD dan UU?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindakan kekerasan dan praktek eksklusi sosial dapat terjadi dalam hubungan antar agama di Indonesia?

Kerangka Konseptual

Dalam melihat hubungan antar agama ini, terdapat dua kerangka analisis yang dipakai oleh sosiolog, yaitu :

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini lebih menekankan pada keteraturan/order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan/equilibrium. Masyarakat menurut teori ini merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian/elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Salah satu tokohnya adalah Robert K. Merton berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dll.

Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu. Masyarakat dilihat dalam kondisi: dinamika dalam keseimbangan.

Pendekatan ini menitikberatkan pada fungsi agama dalam struktur yang saling kait mengait di masyarakat. Teori ini merujuk kepada pendapat Durkheim, yaitu terdapat tiga fungsi utama agama: a). sebagai perekat sosial, b). sebagai kontrol sosial, c). sebagai pemberi makna dan tujuan.

2. Teori Konflik

a) Ralp Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsionalisme struktural yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori ini menilai bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya pemaksaan /tekanan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik.

Sementara itu Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik yaitu:

- 1) Sebagai alat untuk memelihara solidaritas.
- 2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
- 3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.

- 4) Fungsi komunikasi, sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas.
- b) Karl Marx berpendapat bahwa agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, agama hanya alat untuk menanamkan kesadaran palsu (*false consciousness*) agar supaya orang-orang dapat menerima permasalahan sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik.

Agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya (agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat). Karena perebutan kekuasaan dalam suatu negara akan terus berlangsung, agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa.

Dalam makalah ini, penulis akan menganalisa masalah relasi (hubungan) antar agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena yang bersifat paradoks, yaitu agama yang di satu sisi merupakan perekat sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.

Pembahasan

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konflik bisa terjadi?. Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk mencari langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya.

Menjawab pertanyaan ini, penyusun mencoba menguraikan analisa berdasarkan teori konflik Marx, yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia cenderung untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka sendiri) tadi. Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.⁶⁹

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.⁷⁰ Namun, sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.⁷¹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, "Teori Sosiologi: Tentang Pribadi dalam Masyarakat", (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm.7

⁷⁰ Lucia Ratih Kusmadewi, *Relasi Sosial...* hlm., 5

⁷¹ H.A. Masyhur Effendi, "Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)", dalam *Ham dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997), hlm.11

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi terhadap agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa) dari para pemuka agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya. Selain itu adanya perkawinan antara agama dengan negara sehingga agama memiliki kekuasaan yang besar (contohnya pada negara-negara yang memiliki agama mayoritas, seperti Indonesia. Atau daerah yang memiliki agama mayoritas, seperti Islam di Aceh, atau Kristen di Papua).

Penanaman tentang agama ini dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam pola pikir masyarakat umumnya. Hal inilah kemudian yang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma dan aturan-aturan tersebut. Konflik ini kemudian mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di suatu masyarakat. Hal itu bisa kita lihat contoh pada kasus pengusiran warga terhadap tokoh aliran Salafi di Lombok Barat, pada tanggal 12 Mei 2008, disebabkan perbedaan pandangan atau praktik keagamaan.⁷²

Pengaruh dominasi juga menjadi penting dalam masalah ini. Terkadang di suatu daerah yang mayoritas memeluk agama tertentu akan menekan kelompok minoritas yang memeluk agama lain. Ketentuan perundang-undangan dan aturan serta norma dilandaskan pada ketentuan dan norma agama yang dominan di daerah itu. Contohnya di Aceh yang menerapkan hukum Islam. Kemudian, tekanan terhadap kaum minoritas ini juga mengungkung kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah. Kelompok yang memeluk agama mayoritas merasa terganggu apabila ada kelompok minoritas yang menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka, apalagi berencana untuk membangun tempat ibadah. Situasi seperti ini juga dapat menyulut tindak kekerasan, contohnya pengrusakan kompleks Pura Sengkareng di Lombok Barat, pada tanggal 16 Januari 2008.⁷³ Demikian juga kejadian di Temanggung baru-baru ini, karena tidak puas atas pengadilan kepada seorang pendeta yang dianggap melecehkan Islam, ternyata dalam persidangan hanya diputuskan lima tahun –menurut mereka tidak adil-karena tuduhannya pelecehan agama. Akhirnya terjadi kerusuhan-kerusuhan seperti pengrusakan gereja, sekolah-sekolah yang berlabel Kristen.

Kuatnya pengaruh norma agama ini juga memperngaruhi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Banyak tindakan kekerasan kepada perempuan yang disebabkan tafsir agama dan patriarkhis dan pandangan materialis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek.⁷⁴ Mereka yang berpandangan seperti ini menganggap bahwa tubuh perempuan dapat merusak moral masyarakat karena dapat memicu syahwat. Selain itu ada juga kasus di daerah tertentu (yang kekuatan agama mayoritasnya berkuasa) yang memaksakan perempuan mengenakan jilbab, seperti di Aceh. Contoh yang cocok dengan masalah ini adalah UU pornografi yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008. Peraturan ini kemudian menuai banyak kritikan dari berbagai pihak terkait dengan kebebasan berkespresi dan persoalan diskriminasi.

⁷² Zainal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008* hlm.13

⁷³ *Ibid.*, hlm. 18

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 4

Tiga uraian di atas (tentang perbedaan paham agama, pembangunan tempat ibadah, serta UU pornografi) semakin menegaskan implikasi dari teori konflik, yang mengatakan bahwa agama dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di satu pihak mengatakan hal itu benar namun pihak yang lain tidak berpendapat demikian sehingga memicu konflik.

Mengenai kebebasan memeluk agama dan menjalankannya, tentu menjadi pertanyaan kembali, apa faktor yang menyebabkan konflik tetap saja terjadi meskipun peraturan, ketentuan, serta UU tentang kebebasan beragama telah ditetapkan. Seharusnya, sesuai logika, tentu dengan adanya UU tentang kebebasan beragama, tidak mungkin terjadinya konflik. Namun kenyataan serta data-data yang ada berkata lain.

Dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, penyusun mencoba melihatnya dari pendapat Marx, yang mengatakan bahwa agama adalah kendaraan politik kaum elite dalam mempertahankan status quonya.

Sebagai contoh, dari data Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, pada bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi langkah gerak anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Masalah yang dianggap sebagai penodaan agama ini diawali oleh konflik antar masyarakat dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu, sudah jelas bahwa MUI (yang pastinya akan menegakkan hukum-hukum Islam) dan beberapa ormas keislaman dan kelompok kepentingan memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat masyarakat sipil. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian kasus konflik di tingkat masyarakat (umumnya di lingkungan masyarakat yang tidak mengerti tentang masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas (Ahmadiyah) tersebut.⁷⁵

Selain itu bisa kita lihat contoh pada beberapa kasus lain seperti pentingnya agama dalam menentukan siapa berhak memilih siapa dalam jabatan publik, yang mana hal ini mengakibatkan ketegangan antar kelompok keagamaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam menolak rencana pengangkatan Viktor, S.H sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasaman Barat, disebabkan perbedaan agama. Menurut mereka, di negeri Minangkabau yang mayoritas berpenduduk muslim tidak sepatutnya memiliki seorang pemimpin yang beragama Kristen. Contoh lain adalah kasus Rudolf M. Pardede, mantan Gubernur Sumatera Utara, yang sempat menyerukan masyarakat untuk memilih calon gubernur yang seiman (Kristen).⁷⁶

Politisasi agama di dalam Pemilu juga menjadi salah satu faktor timbulnya konflik. Banyak kaum elite yang menggunakan agama untuk mendukung kepentingan mereka, atau dengan agama pemerintah dapat menentukan kebijakan. Akan tetapi penggunaan dasar agama ini tentu hanya berdasar pada satu agama tertentu saja (mayoritas) yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Contohnya MUI di empat propinsi di Kalimantan merekomendasikan bahwa Golput adalah tindakan yang dilarang agama. Meskipun kekritisn umat dan pemimpin agama cukup tinggi dalam hal politisasi agama, namun usaha-usaha ke arah politisasi agama masih terus terjadi.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 10

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 29

⁷⁷ *Ibid.*

Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat implikasi dari teori konflik Marx yang menyatakan bahwa agama menjadi kekuatan kaum elite politik atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruhnya (kekuasaannya) sehingga akan terjadi konflik karena kaum minoritas akan melakukan brontak untuk merebut kekuasaan (sesuai dengan teori dialektis).

Penyebab terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan renungan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna pluralisme itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat lebih mementingkan apa yang baik untuk agama atau golongan yang mereka anut. Di sini lah dituntut kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme tersebut kepada masyarakat melalui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai masalah yang terjadi antara agama-agama di Indonesia (dalam sudut pandang teori konflik), antara lain sebagai berikut:

1. Di Indonesia masih banyak terjadi konflik yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya toleransi antar umat beragama karena masih merasa agama yang mereka anut adalah yang paling benar.
2. Masih terdapatnya kelompok agama yang dominan di beberapa daerah di Indonesia yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang memarginalkan kelompok lain.
3. Banyak aturan-aturan baru dari suatu agama yang membuat rumit agama itu sendiri sehingga menimbulkan pertentangan dengan norma-norma yang ada, yang mengakibatkan konflik.
4. Penyebab utama terjadinya konflik agama adalah disebabkan oleh pengaruh kelompok agama itu sendiri yang sangat dominan di masyarakat. Selain itu agama juga menjadi alat bagi kaum elite tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dari sekian banyak kasus yang telah diuraikan, pemerintah sudah berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, penerapan upaya tersebut kurang maksimal karena masih banyak sifat egois dari masing-masing penganut agama yang fanatik sehingga tidak mau mengindahkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Saran dari penyusun dalam menghadapi masalah hubungan antar agama ini adalah kembali kepada diri individu masing-masing. Karena umat antar agama seharusnya memiliki keterbukaan dalam menanggapi dan melihat perbedaan yang ada di antara mereka. Selain itu, sangat diharapkan kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi antar agama-agama di Indonesia. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme, multikultural, dan masyarakat yang majemuk kepada masyarakat melalui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2001
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008", *Program Studi Agama dan Lintas Budaya*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.
- Effendi, H.A. Masyhur. *Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)", dalam Ham dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997.
- Kusmadewi, Lucia Ratih. *Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia*, Jakarta: FISIP UI, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi : Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Thayib, Anshari dkk. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997